

**REALITAS KONDISI SOSIAL BUDAYA,
PROSES PENCAPAIAN PEKERJAAN DAN PENDAPATAN
DALAM KONTEKS EKONOMI KETENAGA KERJAAN**

Syawaluddin S.

IAIN Sultan Amai Gorontalo
syawaluddin21@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena dari stratifikasi sosial ini akan selalu ada dalam kehidupan manusia, sesederhana apapun kehidupan mereka, tetapi bentuknya mungkin berbeda satu sama lain, semua tergantung bagaimana mereka menempatkannya. Stratifikasi sosial berasal dari istilah Social Stratification yang berarti Sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa apabila pendidikan orang tua lebih menentukan masa depan anak, maka masyarakat itu lebih bersifat prestige based society, sedangkan kalau pekerjaan orang tua lebih menentukan masa depan anak, maka masyarakat itu lebih bersifat class based society. Kajian ini diajukan untuk mengetahui tingkat kompetisi pada satu snapshot titik waktu. Apabila studi-studi lain yang sejenis kelak dapat mengetahui tingkat kompetisi pada titik waktu berikutnya maka kecenderungan (terbuka-tertutupnya kompetisi) dari masyarakat kita dapat diketahui. Proses yang pertama, pelapisan sosial itu terjadi karena tingkat umur (age stratification), Proses yang kedua, yaitu sistem pelapisan yang sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama, disamping dibedakan berdasarkan status yang diperoleh.

Kata Kunci: Sosial Budaya, Pencapaian Pekerjaan

A. LATAR BELAKANG

Menurut Barth (1999) kelompok etnik tidak selalu merupakan suatu *tribe* yang sederhana dengan budaya yang tersusun rapi serta wilayah teritorial yang definitif serta mudah dibedakan batas-batasnya satu sama lain. Batas kelompok etnik yang paling penting menurut Barth adalah batas-batas sosial, bukan teritorial. Kelompok etnik lebih didasarkan kepada pernyataan dan pengakuan yang berkesinambungan mengenai identifikasi dirinya. Seseorang diidentifikasi sebagai warga suatu kelompok etnik apabila dia memiliki kriteria yang sama dalam penilaian dan pertimbangan mengenai batas-batas sosial tadi. Garis pembatas itu antara lain adalah ideologi etnik, seperti nama kelompok, kepercayaan (mitologi) terhadap keturunan dan asal-usul. Selain itu ada juga

karakteristik untuk memudahkan pembedaan seperti dialek bahasa, ekologi kehidupan ekonomi, budaya material, organisasi sosial, agama, dan gaya hidup.

Pengertian tentang etnisitas (kesukubangsaan) karenanya tidak lagi ditekankan pada isi kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok etnik itu, melainkan lebih kepada jatidiri atau identitas yang muncul dalam interaksi sosial. Kajian mengenai kelompok etnik menurut Barth juga bukan lagi kajian mengenai kolektiva dengan isi atau taksonomi kebudayaannya, tapi kajian mengenai organisasi sosial yang askriptif berkenaan dengan asal muasal yang mendasar dan umum dan para pelakunya. Dalam istilah lain, jatidiri itu dinamakan primordialitas, yaitu sebuah dunia jatidiri perorangan atau pribadi yang secara kolektif diratifikasi dan secara publik diungkapkan, yang merupakan sebuah keteraturan dunia (lihat Geertz, dalam Suparlan 1998).

Dengan pengertian yang demikian maka satu hal pasti yang tersisa dan nyaris tidak bisa dihilangkan dan identitas suatu kelompok etnik adalah jatidiri yang bersifat primordial tadi, yang ia akui dan nyatakan dalam interaksi publik. Bahwa ekspresi budaya yang ia tampilkan tidak lagi "genuine" seperti yang diasumsikan melekat sebagai ciri penanda suatu kelompok etnik asal (dalam pengertian klasik) tidak sekaligus menegasikan keanggotaannya dalam suatu kelompok etnik. Seseorang bisa saja menggunakan beragam rujukan untuk ekspresi budayanya, misalnya dan sumber agama, pendidikan, atau dari budaya etnik lain, tanpa harus kehilangan identitas dirinya. Kita ambil contoh, Ambo Tang masih berhak mengaku dan diakui sebagai orang Bugis, meskipun ekspresi budaya yang ia tampilkan sehari-hari sudah pasti tidak lagi merujuk kepada budaya Bugis.

Fenomena seperti ini lazim ditemukan di dalam lingkungan sosial yang heterogen, di mana terjadi pinjam meminjam atribut kebudayaan, tetapi tidak berarti mempertukarkan identitas etnik. Kalau pemahaman seperti ini yang dianut, maka tidak hams muncul ketegangan etnik dalam lingkup interaksi sosial. Pasca-Perang Dunia II, Amerika Serikat (USA) tumbuh lebih pesat dibandingkan dengan Inggris (Treiman & Kerrel, 1978: 563-83). Salah satu sebabnya adalah karena AS menerapkan politik yang menghargai kinerja (*meritocratic*) dan antidiskriminasi, sehingga mendorong anggota masyarakatnya berkompetisi secara lugas, melalui kinerja dan bukan mengandalkan kolusi dan nepotisme. Di dalam politik meritokratik dan antidiskriminasi, sistem penghargaan (*reward system*) bertumpu pada kompetensi yang mendorong investasi pada pendidikan/pelatihan dan mengandalkan kinerja di dunia kerja yang terbuka untuk dikompetisikan kepada semua warga, tanpa melihat asal-usulnya.

Fenomena dari stratifikasi sosial ini akan selalu ada dalam kehidupan manusia, sesederhana apapun kehidupan mereka, tetapi bentuknya mungkin berbeda satu sama lain, semua tergantung bagaimana mereka menempatkannya. Stratifikasi sosial berasal dari istilah Social Stratification yang berarti Sistem berlapis-lapis dalam masyarakat; kata Stratification berasal dari stratum (jamaknya : strata) yang berarti lapisan; stratifikasi sosial adalah pembedaan

penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Selama dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai, maka barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem yang berlapis-lapis dalam masyarakat itu. Barang sesuatu yang dihargai itu mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, mungkin berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan atau mungkin keturunan dari orang terhormat.

Seorang sosiolog, Pitirin A. Sorokin (1957) mengatakan bahwa sistem berlapis itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga itu dalam jumlah yang sangat banyak, suatu keadaan tidak semua orang bisa demikian bahkan hanya sedikit orang yang bisa, dianggap oleh masyarakat berkedudukan tinggi atau ditempatkan pada lapisan atas masyarakat; dan mereka yang hanya sedikit sekali atau sama sekali tidak memiliki sesuatu yang berharga tersebut, dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang rendah. Atau ditempatkan pada lapisan bawah masyarakat. Perbedaan kedudukan manusia dalam masyarakatnya secara langsung menunjuk pada perbedaan pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban, tanggung jawab nilai-nilai sosial dan perbedaan pengaruh di antara anggota-anggota masyarakat.

Sejak manusia mengenal adanya suatu bentuk kehidupan bersama di dalam bentuk organisasi sosial, lapisan-lapisan masyarakat mulai timbul. Pada masyarakat dengan kehidupan yang masih sederhana, pelapisan itu dimulai atas dasar perbedaan gender dan usia, perbedaan antara pemimpin atau yang dianggap sebagai pemimpin dengan yang dipimpin, atau perbedaan berdasarkan kekayaan. Seorang ahli filsafat, Aristoteles, pernah mengatakan bahwa dalam tiap-tiap negara terdapat tiga unsur ukuran kedudukan manusia dalam masyarakat, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat, dan mereka yang berada di tengah-tengahnya. Sedangkan pada masyarakat yang relatif kompleks dan maju tingkat kehidupannya, maka semakin kompleks pula sistem lapisan-lapisan dalam masyarakat itu, keadaan ini mudah untuk dimengerti karena jumlah manusia yang semakin banyak maka kedudukan (pembagian tugas-kerja), hak-hak, kewajiban, serta tanggung jawab sosial menjadi semakin kompleks pula.

Berdasarkan kasus-kasus yang pernah dikaji PPK LIPI (Tirtosudarmo dkk., 1995) terbukti adanya korelasi antara faktor-faktor primordial, seperti asal-usul keturunan dan agama serta etnis, dengan pencapaian pendidikan dan pekerjaan. Herijanto (1988) dalam penelitiannya yang terbatas pada lulusan pendidikan tinggi juga memperlihatkan bahwa lulusan perguruan tinggi tertentu yang didominasi etnik tertentu tampak lebih berhasil meraih pekerjaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi yang lain. Kendati demikian, dari kajian-kajian itu belum terlihat apakah faktor-faktor "keturunan" (ascribed) seperti status sosial, etnisitas dan agama orang tua berpengaruh secara signifikan dalam perbedaan tersebut. Penelitian yang lain, seperti dilakukan oleh Chemikowsky dan Meesok (1981) menyebutkan bahwa pencapaian pendidikan ditentukan terutama oleh pendidikan dan pekerjaan

orang tua. Namun, tulisan ini belum mengungkapkan pengaruh latar belakang primordial (seperti etnik dan agama) serta karakteristik orang tua dalam pencapaian pekerjaan. Oleh karena itu, kendati tulisan ini berdasarkan data yang kurang mutakhir, namun karena kajian kuantitatif tentang pengaruh (bukan hanya korelasi) latar belakang primordial terhadap pencapaian pekerjaan-pendapatan masih terbatas, tulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah kajian stratifikasi sosial dan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengalihan subsidi BBM untuk kesejahteraan masyarakat luas.

B. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana hubungan antara latar belakang primordial itu, dengan pendidikan, cara mencari kerja, serta faktor-faktor apa saja yang secara signifikan menentukan pencapaian pekerjaan dan pendapatan. Sensus dan survei pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia yang dilakukan BPS dan pihak-pihak lain kurang menyediakan data dan temuan kuantitatif untuk menjawab masalah tersebut.

Salah satu survei yang dilakukan oleh PPT-LIPI, sebenarnya memberikan peluang untuk menjawab pertanyaan tersebut, namun hasilnya kurang memuaskan (Sukarno, 1998). Hal itu terjadi karena data pendidikan orang tua (lama pendidikan bersifat nominal, *years of schooling*) dan pekerjaan ayah (dengan *recode kategorikal*) yang terdapat dalam kajian itu tidak dapat diperbandingkan. Akibatnya, hasil analisisnya tidak dapat memberikan jawaban yang tegas apakah pendidikan orang tua ataukah pekerjaan orang tua yang lebih menentukan masa depan pekerjaan dan pendapatan anak.

Secara umum dapat dikatakan bahwa apabila pendidikan orang tua lebih menentukan masa depan anak, maka masyarakat itu lebih bersifat *prestige based society*, sedangkan kalau pekerjaan orang tua lebih menentukan masa depan anak, maka masyarakat itu lebih bersifat *class based society*. Hasil analisis (Sukarno, 1998) tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan orang tua lebih menentukan daripada pekerjaan orang tua bagi masa depan anak (*prestige based society*). Hasil yang meragukan, mungkin disebabkan oleh karena data yang digunakan tidak berimbang (pendidikan orang tua nominal sedangkan pekerjaan orang tua kategorikal), di samping karena adanya bukti dan indikasi yang ditemukan oleh peneliti lain. Antropolog Neils Mulder (1983) misalnya, menyatakan bahwa masyarakat kita, Jawa khususnya,— sedang dalam transisi menuju ke bentuk masyarakat berbasis kelas (*class based society*). Indikasi transisi ini juga terdapat pada temuan peneliti lainnya. Gavin Jones (1998), misalnya, menemukan bahwa partisipasi remaja dalam pendidikan menurun selama dua dekade. Fakta ini mengindikasikan bahwa pendidikan tidak lagi (dipandang) ampuh untuk mengantarkan pada mobilitas sosial, terutama bagi kelompok miskin. Pandangan ini agaknya disebabkan oleh kenyataan bahwa

anak kelompok miskin yang berpendidikan tinggi pun mengalami masa menganggur yang lebih lama dan sulit menemukan pekerjaan yang layak (Sukarno:1998). Hal seperti ini diperkirakan dan terjadi karena kelompok miskin biasanya kekurangan relasi atau koneksi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak (Hechter, 1994 dan Bonacich,1994).

Apakah perkembangan pendidikan dan pekerjaan di Indonesia telah membuka peluang mobilitas sosial? Bagaimana kecenderungannya selama beberapa dekade terakhir? Kecenderungan peningkatan peluang mobilitas dan kompetisi masyarakat dapat diketahui, antara lain dari penurunan pengaruh orang tua dan faktor primordial yang disertai peningkatan pengaruh pendidikan pada pencapaian pekerjaan dan pendapatan. Sayangnya, kajian yang memperlihatkan hal tersebut belum terlihat. Oleh karena itu, kajian ini diajukan untuk mengetahui tingkat kompetisi pada satu *snapshot* titik waktu. Apabila studi-studi lain yang sejenis kelak dapat mengetahui tingkat kompetisi pada titik waktu berikutnya maka kecenderungan (terbuka-tertutupnya kompetisi) dari masyarakat kita dapat diketahui.

C. KERANGKA TEORITIS

Dalam studi sosiologi, terdapat kriteria yang dianggap universal, yaitu kompetensi sehingga seseorang berhak secara sosial untuk menerima status sosial yang tinggi. Bisa digambarkan dengan simplistis, pada zaman pra-modern yaitu ketika lembaga pendidikan belum otonom sebagai lembaga yang mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten, anak mewarisi saja status orang tuanya. Status sosial ekonomi orang tua menurun (*ascribed*) baik pada pekerjaan maupun pada status sosial ekonomi anak. Dalam dunia modern, industrialisasi tumbuh pesat dan lembaga pendidikan berkembang demikian rupa sehingga lebih otonom dan lembaga pendidikan dianggap sebagai lembaga yang menyiapkan manusia yang berkompentensi. Akibatnya, masyarakat modern mengandalkan keluaran pendidikan untuk mengisi berbagai strata jabatan. Namun, hal itu tidaklah cukup, karena untuk mencapai produktivitas yang tinggi status sosial ekonomi seseorang terus dikompentisikan (*contested and achieved*) melalui kinerjanya di dunia pekerjaan.

Dalam model di atas terdapat dua wilayah yang diperebutkan, yaitu dunia pendidikan serta pekerjaan dan pendapatan. Semakin modern suatu wilayah (terbuka, demokratik, dan kompetitif), semakin lemah pengaruh latar belakang orang tua dan latar belakang lainnya terhadap tiga wilayah itu. Hal ini disebabkan karena kriteria merit yang berisi kompetensi, diterapkan di dunia pendidikan dan karier pekerjaan/ pendapatan.

Di negara maju, pendidikan dianggap *public goods*, sedangkan rekrutmen pekerja didasarkan pada "potensi daya produktif individu" dan bukan predikat asal-usul sosialnya. Oleh karena itu, dikonteskan bagi semua orang untuk mendapatkan puncak-puncaknya (*contest mobility*) dan diredam bentuk- bentuk

sponsor yang dalam istilah Turner (1959, 1994) disebut *sponsored mobility*. beberapa negara maju seperti ditemukan oleh Granovetter (1973, 1974, dan 1990) pencari kerja yang mendapat informasi dan kontak dengan pihak di luar garis kekerabatannya akan memperoleh peluang yang lebih besar untuk mengalami peningkatan sosial (*the strength of weak social-ties hypothesis*). Sebaliknya di negara yang korupsi, kolusi dan nepotismenya kuat, pencari kerja yang mendapatkan informasi dan kontak yang dekat dengan pihak pemberi kerja serta penguasa cenderung mendapatkan pekerjaan yang lebih baik (*the strength of strong social-ties hypothesis*, Bian, 1997:366-85).

D. KAJIAN EMPIRIK

1. Identitas Etnik, Ekspresi Budaya, dan Penguasaan Sumberdaya Lokal

Dalam pengertian yang klasik, kelompok etnik (*ethnic group*) dipandang sebagai suatu kesatuan budaya dan teritorial yang tersusun rapi dan dapat digambarkan ke dalam sebuah peta etnografi. Setiap kelompok memiliki batas-batas yang jelas (*well-defined boundaries*) memisahkan satu kelompok etnik satu dengan lainnya. Kemudian secara defacto masing-masing kelompok itu memiliki budaya yang padu (*cultural homogeneity*); satu sama lain dapat dibedakan baik dalam organisasi kekerabatan, bahasa, agama (sistem kepercayaan), ekonomi, tradisi (hukum), maupun pola-pola hubungan antarkelompok etnik, termasuk dalam pertukaran jasa dan pelayanan (lihat Malinowski 1922, dalam Pelly 1998:26). Dengan demikian satu kelompok etnik memiliki suatu identitas khas yang berbeda : dengan kelompok etnik lain, yang dengan mudah terlihat dan cara mereka mengekspresikan atau mengartikulasikan kebudayaannya, termasuk dalam hal bagaimana mereka mengkonsepsikan dan menata pengelolaan dan penguasaan terhadap sumberdaya (alam, ekonomi, dan politik). Bagaimana kelompok etnik yang berbudaya homogen tersebut menyikapi kehadiran orang luar etniknya yang berkepentingan masuk ke wilayah teritorial mereka?. Setiap kelompok etnik telah mengembangkan suatu mekanisme budaya untuk mengakomodasi hal itu, dan sesungguhnya hampir semua kelompok etnik dalam pengertian klasik tadi membuka diri untuk masuknya orang luar. Syaratnya orang luar tersebut bersedia mengikuti aturan main yang berlaku dalam komunitas setempat. Karena di sini ada kebudayaan dominan (*dominant culture*), maka seperti dikemukakan oleh Suparlan (1999).

Para pelaku dan kelompok-kelompok suku bangsa yang tidak dominan menyesuaikan diri dengan, dan tunduk pada, aturan-aturan main yang ditetapkan oleh masyarakat setempat yang dominan" Ungkapan-ungkapan seperti di mana bumi dipijak disitu langit dijunjung; lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalang, dan ungkapan sejenis yang diproduksi oleh setiap kelompok etnik adalah bentuk kearifan untuk mengakomodasi perbedaan atau keragaman budaya. Sepanjang pemahaman dan aturan main yang berlaku setempat dipatuhi oleh warga etnik lain, tidak akan ada ketegangan apalagi konflik etnik

Persoalan muncul ketika sejumlah kelompok etnik bertemu di dalam suatu wilayah teritorial yang tidak bisa lagi didefinisikan secara tradisional sebagai wilayah teritorial suatu kelompok etnik, misalnya di wilayah perkotaan. Kaum migran warga dan beragam kelompok etnik yang berbeda-beda itu hidup bersama di lingkungan sosial baru, berinteraksi satu sama lain, dan harus bersinggungan kepentingan dalam konteks pemanfaatan dan penguasaan sumberdaya yang terbatas dan berbeda jenisnya dan sumberdaya yang mereka miliki sebelumnya di wilayah teritorial asal. Kalau di daerah asal misalnya sumberdaya utama yang menjadi rebutan adalah tanah, maka di lingkungan perkotaan bergeser menjadi sumberdaya-sumberdaya immaterial seperti informasi, kedudukan atau jabatan di birokrasi, jasa, dan lain sebagainya. Kalau penguasaan terhadap tanah milik suatu kelompok etnik diklaim berdasarkan alasan-alasan ideologis, mitologis dan historis; maka klaim penguasaan terhadap sumberdaya politik dan ekonomi di perkotaan (berupa jabatan, kedudukan, dsb.) bukan diperoleh dan "nenek moyang" melainkan didapatkan dari negara; dan sejatinya sumberdaya itu terkategorikan sebagai sumberdaya milik bersama (*common property resources*), bukan *communally owned resources* (untuk konsep ini lihat Acheson, 1989).

Jika arena sosial baru di lingkungan perkotaan itu dikuasai oleh suatu golongan yang dominan kebudayaannya, misalnya kasus kota Bandung dalam kajian Edward Bruner (1974) dan Suparlan (1972) maka biasanya para pelaku dan kelompok-kelompok suku bangsa yang tidak dominan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, dan tunduk pada aturan-aturan main yang ditetapkan oleh masyarakat setempat yang dominan (dalam konteks Bandung adalah budaya Sunda). Orang Batak berdasarkan kajian Bruner, dan orang Jawa dalam kajian Suparlan di Bandung menjadi cenderung seperti orang Sunda dalam upaya mereka untuk menaati aturan yang berlaku di tempat-tempat umum. Sebaliknya, jika tidak ada golongan yang memiliki kebudayaan dominan seperti kasus kota Medan, maka menurut Suparlan (1999:15) aturan-aturan main terwujud melalui tawar-menawar kekuatan sosial yang dihasilkan dan proses- proses interaksi sosial yang berlangsung dan waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi.

Fenomena yang terjadi di Medan dengan ketiadaan suatu kebudayaan dominan menurut temuan Edward Bruner (1974) adalah kecenderungan kaum migran untuk mengelompok bersama dengan sesama warga : suku bangsanya, dan memperkuat posisi kelompok suku bangsanya dalam hubungan antarsuku bangsa dan dalam bersaing untuk posisi-posisi yang ada dalam struktur kekuasaan kota Medan. Masing-masing kelompok suku bangsa menciptakan keteraturan sosial dalam lingkungan kehidupan masyarakat suku bangsanya. Di tempat-tempat umum mereka saling berkompetisi dengan mengaktifkan kesukubangsanya. Asosiasi-asosiasi sukarela yang tumbuh di perkotaan, yang menghimpun kelompok etnik dan agama, menurut hasil penelitian Usman Pelly (1994:285) merupakan mekanisme-mekanisme adaptif untuk menjaga identitas. Tetapi dalam konteks perjuangan politis, menurut Usman Pelly, identitas etnik

harus disamakan karena tidak menguntungkan dan tidak pantas mengekspresikan kepentingan-kepentingan etnik sempit, terutama dalam perjuangan-perjuangan ekonomik dan sosio-politis di tengah masyarakat kota yang majemuk.

Sekelompok orang yang menggunakan suatu atribut etnik yang sama, tidak dengan serta merta akan mengekspresikan kebudayaan yang sama, dan juga belum tentu mengkonsepsikan penguasaan sumberdaya untuk kepentingan kolektif kelompok pemilik atribut etnik itu. Oleh karena itu, presensi seseorang dalam suatu jabatan publik tidak selalu relevan untuk dikaitkan dengan representasi kelompok etnik tertentu.

2. Dasar Timbulnya Pelapisan Sosial

Telah kita ketahui sebelumnya bahwa dasar pokok timbulnya sistem pelapisan dalam masyarakat itu karena adanya sistem penilaian atau penghargaan terhadap berbagai hal dalam masyarakat tersebut; berkenaan dengan potensi, kapasitas atau kemampuan manusia yang tidak sama satu dengan yang lain, dengan sendirinya sesuatu yang dianggap bernilai atau berharga itu juga menjadi keadaan yang langka, orang akan senantiasa meraih penghargaan itu dengan sekuat tenaga baik melalui persaingan bahkan tidak jarang dengan melalui konflik fisik.

Fenomena kekuasaan misalnya, hampir semua orang memiliki dorongan untuk berkuasa baik untuk kelompok skala kecil sampai skala besar, tetapi tidak bisa semua orang bisa menjadi penguasa; ada mekanisme pengaturan dalam masyarakat tentang kekuasaan ini, setiap masyarakat atau bahkan kelompok pasti mempunyai ukuran tentang idealisme diberadakkannya unsur penguasaan dalam masyarakat atau kelompoknya, sekurangnya penguasa ini dianggap sebagai simbol atau figur yang dapat memimpin, mengatur, atau mewakili aspirasi kelompok. Tidak mungkin simbol atau figur ini di bagi rata pada setiap anggota kelompok, orang akan mempercayakan kekuasaan ini sekurangnya pada satu orang atau bahkan beberapa orang yang dianggap dapat memimpin orang banyak; tentang bagaimana prosesnya sehingga penguasaan itu ada pada kelompok atau masyarakat, apakah melalui pemilihan atau melalui unsur paksaan, itu persoalan lain.

Dalam masyarakat yang kompleks, agaknya tidak efektif lagi bila kekuasaan itu pada satu tangan, kekuasaan pada keadaan ini mulai disebar pada individu-individu sesuai dengan kemampuan, potensi, keterampilan dan pengalaman masing-masing; hanya tetap saja koordinasi ada pada satu tangan, Sekurangnya ada dua proses timbulnya pelapisan dalam masyarakat itu; pertama, terjadi dengan sendirinya, dan ke-dua sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama.

Proses yang pertama, pelapisan sosial itu terjadi karena tingkat umur (*age stratification*), dalam sistem ini masing-masing anggota menurut klasifikasi umur mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda; untuk masyarakat-masyarakat tertentu, ada keistimewaan dari seorang anak sulung

dimana dengan nilai-nilai sosial yang berlaku mereka mendapat prioritas dalam pewarisan atau kekuasaan. Azas senioritas yang ada dalam sistem pelapisan ini dijumpai pula dalam bidang pekerjaan, agaknya ada hubungan yang erat antara usia seorang karyawan dengan pangkat atau kedudukan yang ditempatinya. Initerjadi karena dalam organisasi tersebut pada dasarnya karyawan hanya dapat memperoleh kenaikan pangkat setelah berselang suatu jangka waktu tertentu misalnya dua tahun, atau empat tahun; karena jabatan dalam organisasi hanya dapat dipangku oleh karyawan yang telah mencapai suatu pangkat minimal tertentu; dan karena dalam hal terdapat suatu lowongan jabatan baru, karyawan yang dipertimbangkan untuk mengisinya ialah mereka yang dianggap paling senior.

Walaupun tidak mutlak benar, faktor kepandaian atau kecerdasan (*intellegensia*) pada umumnya masing dipakai sebagai tolok ukur untuk membedakan orang dengan orang lainnya; dikatakan tidak mutlak benar, karena dalam penelitian modern ternyata faktor kecerdasan ini tidak sekedar hanya bisa dibangkitkan, dikembangkan bahkan juga bisa ditingkatkan yaitu dengan melalui latihan-latihan tertentu sehingga kedua belah bagian otak kiri dan kanan terangsang untuk berfikir, kreatif secara benar.

Faktor kepandaian atau kecerdasan (*Intellegensia*) seolah-olah memilah kelompok sekurangnya menjadi dua, yaitu orang-orang yang dianggap mempunyai kepandaian yang lebih dan orang-orang yang berkepandaian kurang, dalam istilah sehari-hari orang-orang yang kurang pandai ini dikatakan sebagai orang yang ‘susah mengingat-gampang lupa’. Kepandaian disini harus dibedakan dengan keterampilan, ada orang pandai tetapi tidak terampil, ada orang yang terampil tetapi tidak pandai, ada orang yang tidak pandai tetapi tidak terampil dan yang paling baik adalah orang yang pandai tetapi juga terampil.

Biasanya faktor kekerabatan disini berhubungan dengan kedudukan dalam keluarga atau menyangkut sistem pewarisan. Semakin jauh hubungan kerabatnya maka semakin kecil kesempatan seseorang untuk menempati kedudukan tertentu dalam keluarga atau bahkan semakin kecil pula kesempatannya untuk memperoleh seperangkat fasilitas yang diwariskan oleh keluarganya. Tidak seluruh anggota keluarga dapat menjadi ketua adat pada salah satu keluarga Batak Toba misalnya, selama individu tersebut tidak memiliki akses kuat dalam keluarga yang bersangkutan, atau misalnya yang berlaku pada kelompok Dayak Iban di Kalimantan, atau banyak lagi kelompok-kelompok yang tersebar di belahan bumi Indonesia dengan orientasi kekerabatan yang masih kuat.

Bentuk lain dari sistem pelapisan yang terjadi dengan sendirinya adalah gender, fenomena ini walaupun tidak mutlak menentukan suatu pelapisan namun dalam beberapa hal juga menunjuk pada sistem itu. Sistem pewarisan pada beberapa masyarakat menunjukkan kecenderungan bahwa laki-laki berhak mewarisi lebih dari perempuan; atau dalam bidang pekerjaan, khususnya pada kehidupan masyarakat yang belum begitu modern, dominasi laki-laki terasa lebih kental dibandingkan dengan perempuan, partisipasi perempuan dalam

dunia kerja relatif lebih terbatas; dibandingkan dengan laki-laki para pekerja perempuan pun relatif lebih banyak terdapat di strata yang lebih rendah, dan sering menerima upah atau gaji yang lebih rendah dari laki-laki.

Proses yang kedua, yaitu sistem pelapisan yang sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama, disamping dibeda-bedakan berdasarkan status yang diperoleh, anggota masyarakat dibeda-bedakan pula berdasarkan status yang diraihinya, sehingga menghasilkan berbagai jenis stratifikasi. Salah satu diantaranya adalah stratifikasi berdasarkan pendidikan (*educational stratification*); bahwa hak dan kewajiban warga negara sering dibeda-bedakan atas dasar tingkat pendidikan formal yang berhasil mereka raih.

Sistem stratifikasi yang lain yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ialah stratifikasi pekerjaan (*occupational stratification*). Di bidang pekerjaan modern kita mengenal berbagai klasifikasi yang mencerminkan stratifikasi pekerjaan, seperti misalnya perbedaan antara manager serta tenaga eksekutif dan tenaga administratif, buruh; antara tamtama, bintara, perwira pertama, perwira menengah, perwira tinggi.; Kepala dinas, kepala bagian, kepala seksi, kepala koordinator dan sebagainya.

Stratifikasi ekonomi (*economic stratification*), yaitu perbedaan warga masyarakat berdasarkan penguasaan dan pemilikan materi, pun merupakan suatu kenyataan sehari-hari. Dalam kaitan ini kita mengenal, antara lain, perbedaan warga masyarakat berdasarkan penghasilan dan kekayaan mereka menjadi kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Dalam masyarakat kita terdapat sejumlah besar warga yang tidak mampu memenuhi keperluan minimum manusia untuk hidup layak karena penghasilan dan miliknya sangat terbatas, tetapi ada pula warga yang seluruh kekayaan pribadinya bernilai puluhan miliar bahkan ratusan miliar rupiah. Di kalangan petani di pedesaan, kita menjumpai beberapa perbedaan antara petani pemilik tanah, petani penggarap dan buruh tani, yang mana masing-masing strata itu memiliki cara hidup tersendiri sesuai dengan kedudukan (ekonomi) nya dalam masyarakat.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa ada pula sistem stratifikasi sosial yang dengan sengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama; hal itu biasanya dilakukan terhadap pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi-organisasi formal, seperti misalnya pemerintahan, perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata, atau perkumpulan. Kekuasaan dan wewenang itu merupakan suatu unsur yang khusus dalam sistem pelapisan dalam masyarakat, unsur mana mempunyai sifat yang lain daripada uang, tanah, dan sebagainya dapat terbagi secara bebas di antara anggota suatu masyarakat tanpa merusak keutuhan masyarakat itu.

3. Tolok Ukur

Sistem pelapisan sosial terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian lapisan atas yang terdiri dari individu-individu yang memiliki lebih hal-hal yang

bernilai atau berharga dalam masyarakat; kedudukannya ini bersifat kumulatif dalam arti mereka yang memiliki uang banyak misalnya, akan mudah sekali untuk mendapatkan tanah, kekuasaan atau mungkin juga kehormatan. Ukuran atau kriteria yang biasanya dipakai untuk menggolong-golongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Ukuran kekayaan; ukuran ini dapat berupa kebendaan, barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, orang-orang itu termasuk lapisan paling atas; kekayaan tersebut, misalnya dapat dilihat dari tempat tinggal, besarnya tempat tinggal, kendaraan-kendaraan, pakaian-pakaiannya yang dikenakan, kebiasaannya dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, yang semuanya itu dianggap sebagai status simbol atau lambang-lambang kedudukan seseorang yang membedakannya dengan orang kebanyakan,
- b) Ukuran kekuasaan; barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar, maka orang atau orang-orang itu menempati lapisan tertinggi dalam masyarakat.
- c) Ukuran kehormatan; ukuran ini mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan kekuasaan, ukuran semacam ini biasanya hidup pada bentuk-bentuk masyarakat yang masih tradisional, orang-orang yang bersangkutan adalah individu yang dianggap atau pernah berjasa besar dalam masyarakat; orang atau orang-orang yang paling dihormati atau yang disegani, ada dalam lapisan atas.
- d) Ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran ini biasanya dipakai oleh masyarakat-masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi ada kalanya ukuran tersebut menyebabkan akibat-akibat yang negatif, oleh karena kemudian ternyata bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi gelar kesarjanaannya; sudah tentu hal ini mengakibatkan segala macam usaha untuk mendapatkan gelar tersebut, walau melalui mekanisme yang tidak benar.

Ukuran-ukuran tersebut di atas, tidaklah bersifat limitatif, oleh karena masih ada ukuran-ukuran lainnya yang dapat dipergunakan. Akan tetapi ukuran-ukuran itu adalah aspek yang menonjol sebagai dasar timbulnya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Pada beberapa masyarakat tradisional di Indonesia, golongan pembuka tanahlah yang dianggap menduduki lapisan tertinggi; misalnya di Jawa, kerabat dan keturunan pembuka tanahlah yang dianggap oleh masyarakat desa sebagai kelas tertinggi dalam masyarakat. Kemudian menyusul para pemilik tanah, walaupun mereka bukan keturunan pembuka tanah; mereka di sebut pribumi, sikep atau kuli kenceng. Lalu menyusul mereka yang hanya mempunyai rumah atau pekarangan saja (golongan ini di sebut kuli gundul, lindungatau indung), dan akhirnya kelompok mereka yang hanya menumpang saja pada tanah milik orang lain.

4. Pendapatan

Pendapatan dalam kajian ini adalah pendapatan rata-rata per bulan yang diperoleh dari pekerjaan utama maksimum enam bulan terakhir, (khususnya)

dari mereka yang bekerja pada pihak lain (bukan sebagai pekerja keluarga). Bourdieu (1986) menyebutkan bahwa pendapatan pada dasarnya merupakan hasil dari eksploitasi yang berujung pada konversi dari sumber-sumber atau modal fisik (body), sosial, politik, budaya—termasuk pendidikan— serta ekonomi menjadi economic currency. Economic currency yang dimaksud di sini adalah uang. Dalam studi ini hanya sedikit saja dari modal atau sumber-sumber tadi yang diuji perannya terhadap pencapaian pendapatan seseorang. Di samping variabel-variabel yang digunakan untuk menerangkan pencapaian pekerjaan seperti terlihat pada bab sebelumnya, ditambahkan pula variabel "jenis pekerjaan" dan "lamanya bekerja pada pekerjaan terakhir itu" sebagai variabel penentu.

Dua variabel ini sering diungkapkan sebagai penentu yang sangat kuat bagi "karier" seseorang dan secara umum dipahami sebagai penentu utama pendapatan seseorang. Apakah benar demikian?, Memang, pekerjaan yang dicapai seseorang boleh dikatakan hasil akumulasi sinergi antara ijazah, cara mencari kerja, on-the-job training (pengalaman kerja dan lamanya bekerja pada pekerjaan tersebut) termasuk faktor-faktor lingkungan sosial dan karakter individual di satu pihak dan di pihak lain terbukanya jabatan dan jenjang karier yang tersedia di tempat bekerja. Pertanyaannya adalah apakah faktor orang tua dan faktor primordial lainnya terus berhenti begitu seseorang mencapai pekerjaan itu, ataukah faktor-faktor itu dapat terus diperhitungkan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik? Apakah faktor keturunan, faktor primordial dan faktor pendidikan tidak terus berperan dalam menentukan pendapatan seseorang di samping dua variabel tadi? Secara sosiologis seseorang yang hidup dengan pekerjaannya tidaklah terlepas baik dari kehidupan sosial politik dan budaya maupun dari ekonomi keluarga dan lingkungannya. Bahkan dalam menjalani pekerjaan itu, faktor-faktor di atas itu terus mempengaruhi kinerja dan ikut menentukan pendapatannya, di samping ditentukan oleh faktor struktural dan faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi dari dunia tempat kerjanya.

Bias kepada anak laki-laki itu dapat terjadi karena dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarkat. Semakin tinggi pendidikan dan pekerjaan orang tua semakin besar pengaruh positifnya terhadap pencapaian pendapatan laki-laki. Agaknya hal ini mengindikasikan bahwa orang tua dari kelas atas lebih kuat dalam memberikan dorongan karier kepada anak laki-laki dibandingkan kepada anak perempuan. Apakah ini berarti bahwa pada kelompok sosial ekonomi menengah atas dorongan terhadap anak perempuan memasuki dunia kerja bukan untuk tujuan peningkatan kariernya? Ataukah kelambanan peningkatan karier tersebut terjadi oleh karena proteksi yang berlebihan dan menjadikan anak perempuan yang bekerja bukan sebagai andalan sumber pendapatan keluarga? Apakah dengan demikian pada kalangan masyarakat kelas atas sexual division of labour lebih kuat dibandingkan dengan pada kelas bawah? Dalam hal ini, keterangan Papanek (1985:312-22) yang menyebutkan bahwa alasan yang berbeda antara keluarga mampu dan keluarga yang tidak mampu untuk

melibatkan perempuan dalam pasar kerja, dapat memberikan penjelasan. Keluarga yang kurang mampu, menurut Papanek, melibatkan perempuan dalam pasar kerja terutama untuk tujuan survival, sedangkan bagi keluarga mampu melibatkan perempuan ke dalam pasar kerja lebih karena tujuan gengsi.

Keterangan ini dapat diekstrapolasi untuk menerangkan bahwa terdapat dorongan yang lebih kuat pada perempuan yang lahir dari keluarga kurang mampu untuk meraih nilai balik yang maksimal dari investasi pendidikannya. Akibatnya, berbeda dengan perempuan dari keluarga mampu yang cenderung kurang diarahkan untuk meraih secara maksimal nilai balik investasi, perempuan dari keluarga kurang mampu "dituntut" secara moral untuk secara maksimal meraih nilai balik (pendapatan) dari ongkos ekonomi ketika bersekolah dan biaya sosial yang tinggi yang telah dicurahkan ketika bekerja. Tetapi sebaliknya, berbeda dengan kasus perempuan dari keluarga kelas atas, pada anak laki-laki dari keluarga mampu agaknya justru terdapat "beban" moral untuk meneruskan prestise dan kedudukan sosial ekonomi orang tua sehingga mendorong mereka untuk mendapatkan penghasilan tinggi, yaitu untuk mewarisi kelas sosial orang tuanya. Terlepas dari kemungkinan ini, bias kelompok atas dalam mendorong karier dan pendapatan bagi anak laki-laki agaknya menunjukkan bahwa kelas atas merupakan segmen yang penting bagi proses reproduksi sosial untuk melestarikan patriarki.

5. Kedudukan (status)

Kadang-kadang dibedakan antara pengertian-pengertian 'kedudukan' (status), dengan 'kedudukan sosial' (social status); kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang-orang lainnya dalam kelompok tersebut atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lainnya di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Kedudukan sosial artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Kedudukan sosial tidaklah semata-mata berarti kumpulan kedudukan-kedudukan seseorang dalam kelompok-kelompok yang berbeda, akan tetapi kedudukan-kedudukan sosial tersebut mempengaruhi kedudukan orang tadi dalam kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Untuk lebih mudah mendapatkan pengertian, kedua istilah tersebut di atas akan dipergunakan dalam arti yang sama dan digambarkan dengan istilah 'kedudukan' (status) saja.

Kedudukan, sebagaimana lazim dipergunakan, mempunyai dua arti :

- a) Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu; dengan demikian seseorang dikatakan memiliki beberapa kedudukan, oleh karena seseorang biasanya ikut serta dalam berbagai pola-pola kehidupan. Pengertian tersebut menunjukkan tempatnya sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh.
- b) Apabila dipisahkan dari individu yang memilikinya, kedudukan hanya

merupakan kumpulan hak-hak dan kewajiban-kewajiban termaksud hanya dapat terlaksana melalui perantara individu-individu, maka agak sukar untuk memisahkannya secara tegas dan kaku.

- c) Hubungan antara individu dengan kedudukan, dapat diibaratkan sebagai hubungan pengemudi mobil dengan tempat atau kedudukan si pengemudi dengan mesin mobil tersebut; tempat mengemudi dengan mesin mobil tersebut; tempat mengemudi dengan segala alat untuk menjalankan mobil adalah alat-alat tetap yang penting untuk menjalankan serta mengendalikan mobil tersebut, pengemudi dapat berganti-ganti, yang mungkin akan dapat menjalankannya dengan lebih baik, atau bahkan lebih buruk.

Dalam masyarakat, sekurangnya ada tiga macam kedudukan, yaitu :

a. *Ascribe status*,

Yakni kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan; kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Pada umumnya ascribe status dijumpai pada masyarakat-masyarakat dengan sistem pelapisan yang tertutup, atau masyarakat dimana sistem pelapisannya tergantung pada perbedaan rasial. Namun demikian, ascribe status juga ditemukan pada bentuk-bentuk masyarakat dengan sistem pelapisan yang terbuka; misalnya

kedudukan laki-laki dalam satu keluarga, kedudukannya berbeda dengan kedudukan istri atau anak-anaknya; ascribe status disini walaupun tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi pada umumnya sang ayah atau suami adalah kepala keluarga batihnya. Untuk menjadi kepala keluarga batih tersebut, laki-laki tidak perlu mempunyai darah bangsawan atau kasta tertentu, sosok seorang ayah tetap saja sebagai kepala rumah tangga.

Adalah kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha yang disengaja; kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja hal mana tergantung dari kemampuannya masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya; seseorang yang ingin menjadi pemain bulu tangkis yang handal, tentunya harus berlatih bulu tangkis dengan tekun, seseorang yang ingin menjadi dokter, tentunya harus belajar kedokteran. Kecenderungan tercapainya achieved status ini biasanya ditemukan dalam bentuk-bentuk masyarakat dengan sistem pelapisan yang terbuka, hal ini bisa terjadi karena nilai-nilai dalam masyarakat memungkinkan untuk berlakunya tindakan-tindakan seperti itu. Anak seorang Rudy Hartono belum tentu akan menjadi pemain bulu tangkis yang handal, walaupun kalau hanya untuk sekedar menjadi juara RT mungkin bisa, sedangkan orang tua Rudy Hartono mungkin seorang pebulu tangkis tetapi prestasinya tidak sehebat anaknya.

b. *Assigned Status*

Satu bentuk kedudukan yang mempunyai hubungan erat dengan achieved status, yaitu kedudukan yang diberikan karena alasan-alasan tertentu; dalam arti

bahwa suatu kelompok, golongan, atau masyarakat memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang dianggap berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Akan tetapi kadang-kadang kedudukan tersebut diberikan, karena seseorang telah lama menduduki suatu jabatan tertentu, seperti di pedesaan ada istilah 'lurah hormat' adalah satu gelar yang diberikan kepada seorang mantan pemuka desa yang dianggap sangat berjasa atas kemajuan desanya. Kedudukan yang diberikan ini diwujudkan dalam bentuk penghormatan gelar tertentu seperti 'datuk' pada masyarakat Sumatera Barat, 'sir' pada masyarakat Inggris, atau 'andi' pada masyarakat Makasar; Individu-individu yang mendapatkan kedudukan ini tidak dibebankan atas kewajiban-kewajiban menurut kedudukannya, namun mereka sedikitnya mendapatkan fasilitas-fasilitas khusus yang tidak diberikan pada orang kebanyakan, di samping itu kedudukan ini tidak terbatas diberikan kepada anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan, tetapi bisa juga kepada orang luar masyarakat tersebut.

Telah kita fahami bahwa manusia itu hidup berkelompok, kalau mengacu pada teori Van der Zanden (1979), seorang individu bisa diidentifikasi sebagai anggota kategori statistik, kategori sosial, kelompok sosial, asosiasi, dan kerumunan, belum lagi bila dilihat dari aspek kepentingan maka seorang manusia itu bisa termasuk dalam beberapa kelompok kepentingan. Berkenaan dengan keberadaannya dalam kelompok-kelompok, maka tentu setiap orang tidak akan luput dari kedudukan-kedudukannya baik dalam lingkup persekutuan hidup yang kecil maupun dalam lingkup masyarakat yang lebih besar. Seorang bapak guru misalnya, selain kedudukannya sebagai guru dia juga termasuk kategori laki-laki dewasa, dia juga adalah anak dari kedua orang tuanya, mungkin juga selain guru dia dipercaya untuk mengelola urusan koperasi sekolah, atau mungkin juga dia aktif sebagai pengurus PGRI, atau mungkin juga dia sebagai ayah bagi anak-anaknya sekaligus sebagai suami dari istrinya, dan sebagainya.

Ada kalanya dari seperangkat kedudukan seseorang dalam masyarakat terjadi pertentangan-pertentangan berkaitan dengan kedudukannya itu, keadaan mana dalam istilah sosiologi disebut sebagai status konflik. misalnya bapak guru seperti di atas tadi, yang pada suatu saat harus menghukum seorang siswa yang melanggar aturan sekolah, dimana siswa tersebut adalah puteranya sendiri, atau seorang jaksa yang harus menuntut anaknya sendiri karena melakukan tindak pidana, atau seorang petugas pajak yang harus memungut pajak penghasilannya sendiri. Konflik antar kedudukan-kedudukan tersebut tidak bisa dihindari berhubung kepentingan-kepentingan individu tidak selalu sesuai atau sejalan dengan kepentingan-kepentingan masyarakatnya, sehinggasingkali sulit bagi individu tersebut untuk mengatasinya dengan benar.

Kedudukan macam mana yang dimiliki seseorang atau kedudukan apa yang melekat padanya, dapat terlihat pada kehidupan sehari-harinya melalui

ciri-ciri tertentu, yang dalam ilmu sosiologi dinamakan status symbol; ciri-ciri tersebut seolah-olah sudah menjadi bagian dari hidupnya.

Ada beberapa ciri tertentu yang dianggap sebagai status symbol, misalnya cara berpakaian, pergaulan, cara-cara mengisi waktu senggang, memilih tempat tinggal, berkendara, rekreasi, serta kebiasaan-kebiasaan lain yang membedakannya dengan orang-orang kebanyakan. Status symbol ini tidak hanya melekat pada golongan atau lapisan tertentu saja, namun setiap lapisan biasanya mempunyai ciri-ciri tersendiri.

Satu bentuk penghargaan yang ada dalam masyarakat modern, khususnya pada masyarakat perkotaan di Indonesia, adalah tingkat penguasaan ilmu yaitu dalam bentuk gelar-gelar intelektual; seseorang yang memiliki gelar keserjanaan tertentu setidaknya telah membuktikan bahwa yang memperolehnya telah memenuhi beberapa persyaratan tertentu dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan yang khusus. Hal ini menyebabkan terjadinya beberapa akibat yang negatif, antara lain bahwa, yang dikejar bukanlah ilmu pengetahuannya, akan tetapi gelar keserjanaannya. Gelar tersebut kemudian menjadi status symbol tanpa menghiraukan bagaimana isi yang sesungguhnya; banyak dari mereka yang merasa malu karena tidak memiliki gelar keserjanaan, padahal kedudukan mereka di dalam masyarakat telah terpandang; segala cara diupayakan untuk mendapatkan gelar itu tanpa memperdulikan lagi apakah kemudian mereka dapat mempertanggung jawabkan terhadap apa yang telah mereka upayakan itu.

REFERENSI

- Bian, Yanjie. 1997. "Bringing Strong-ties Back In: Indirect Ties, Network Bridges, and Job Searches in China". *American Sociological Review* (64): 366-85.
- Barth, Fredrik. 1988. *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta: UI-Press
- Blau, Peter M., Otis Dudley Duncan and Andrea Tyree. 1993. "The Process of Stratification", in David B. Grusky (Ed.), *Social Stratification in Sociological Perspective*. Boulder: Westview Press, 317-28.
- Bonacich, Edna. 1994. "A Theory of Ethnic Antagonism: The Split Labour Market" in David B. Grusky (Ed.). *Social Stratification its Sociological Perspective*. Boulder: Westview Press, 469-487.
- Bourdieu, Pierre. 1986. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, translation from Richard Nice, Routledge and Kegan Paul, London.
- Chemikowsky dan Meesok. 1981. *The Determinants of School Enrollment in Indonesia*. Jakarta: the World Bank.
- Granovetter, Mark S. 1973. "The Strength of Weak Ties", *American*

- Sociological Review (78): 136-78.
- . 1974. *Getting A Job: A Study of Contacts and Careers*. London: Harvard University Press.
- . 1990. "Toward a Sociological Theory of Income Differences", in David
- B.Grusky (Ed.), *Social Stratification: Class, Race and Gender in Sociological Perspective*. Boulder: Westview Press, 365-83.
- Gray, Alan. 1994. "Statistics Lecture Note" (unpublished).
- Hechter, Michael. 1994. "Towards a Theory of Ethnic Change" in David B. Grusky (Ed.), *Social Stratification: Class, Race and Gender in Sociological Perspective*. Boulder: Westview Press, 487-501.
- Jones, Gavin W. 1993. "Dilemmas in Expanding Education for Faster Economic Growth: Indonesia, Malaysia, and Thailand", in Naohiro Ogawa, Gavin W. Jones and Jeffrey G Williamson (Eds.), *Human Resources in Development along the Asia- Pacific Rim*. Singapore: Oxford University Press, 229-58.
- Mulder, Niels. 1985. *Pribadi dan Masyarakat di Jawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sukarno, Makmuri. 1998. "The Transition from School to Work and Job Seeking Behaviour Among Youth In Three Cities ofJava". (Unpublisehd dissertation, The Australian National University, Canberra).
- Sukarno, Makmuri. 2002. "Latar Belakang Sosial dan Pencapaian Pendidikan", *Penduduk & Pembangunan XIII*, 2: 1-19.
- Suparlan, Parsudi. 1998. "Kesukubangsaan dan Primordialitas: Program Ayam di Desa Mwapi, Timika, Irian Jaya." *Dalam Jurnal Antropologi Indonesia* No. 54 Thn 1998.
- Suparlan, Parsudi. 1999. "Kemajemukan, Hipotesis Kebudayaan Dominan, dan Kesukubangsaan." *Dalam Jurnal Antropologi Indonesia* No. 58 Thn 1999.
- Tirtosudarmo, Riwanto, Tri Handayani dan Daliyo. 1995. "Pemuda dalam Konteks Transformasi Demografi-Ekonomi Daerah Perkotaan", dalam Riwanto Tirtosudarmo, Daliyo, Mita Noveria, Roosmalawati Rusman, Sumono, dan Tri Handayani, *Dinamika Sosial Penduduk Usia Muda (15-29 Tahun) di Daerah Perkotaan Indonesia*. Jakarta: PPT-LIPI, 23-42.
- Turner, Ralph H. 1959. "Sponsored and Contest Mobility and the School System", in David B. Grusky, (1994) *Social Stratification: Race, Class and Gender in Sociological Perspective*. Boulder: Westview Press, 260-64.

Treiman, Donal J. and K. Terrell. 1975. "The Process of Stratification in the United States and Great Britain". *American Journal of Sociology* 81: 563-83.